



Daftar Isi

1	Pelatihan Penyusunan RAP Otonomi Khusus dan DTI Provinsi Papua
3	Rapat Koordinasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Papua
5	Rembuk Stunting Provinsi Papua Dan Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Stunting Kabupaten/ Kota Se-Propinsi Papua Tahun 2024
7	Papua Gelar Peningkatan Kapasitas Pembangunan Berkelanjutan
9	Rapat Koordinasi Informasi Geospasial (IG) Regional Papua-Maluku
10	Papua Susun Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2025-2029
11	Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 Dan Musrenbang Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun 2025
13	Rapat Koordinasi Manajemen Daerah (Rakormanda) Provinsi Papua
14	Rapat Koordinasi Teknis Daerah (Rakortekda) Papua 2024 Berfokus pada Program Kerjasama RI-UNICEF
15	Papua Gelar Coaching Clinic 1 Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dan Implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) Provinsi Papua Tahun Anggaran 2024
16	Pj Gubernur Papua Dorong Efektivitas Pelaksanaan APBD 2024 Melalui Monitoring Meja
17	Lomba Inovasi Daerah "LOVE PAPUA"
19	Pilot Project Pembangunan Kampung Mandiri Ekonomi (KAMI Papua): Pola Pembangunan Kolaboratif Pemerintah Provinsi Papua
23	Pendataan OAP untuk Perencanaan Pembangunan Papua yang Lebih Baik
25	Serba-serbi..
29	Infografis Capaian Kinerja Pembangunan

PENGANTAR REDAKSI

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Salam Sejahtera bagi kita semua.

Segala Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perkenaanNya sehingga Buletin Bapperida Provinsi Papua Edisi 6 Tahun 2024 dapat diterbitkan.

Tujuan dari hadirnya Buletin ini untuk mempublikasikan data dan informasi aktivitas kegiatan kinerja Bapperida Provinsi Papua. dengan harapan dengan Adanya Buletin ini dapat memberikan manfaat tambahan tentang perencanaan pembangunan daerah provinsi Papua.

Kami menyadari keterbatasan kami dalam penyusunan buletin ini sehingga kami berharap adanya masukan, saran kritik yang membangun untuk perbaikan mutu buletin ini diwaktu mendatang.

Akhirnya Semoga Buletin ini bermanfaat, selamat Membaca!

Semoga Tuhan Memberkati kita semua.Amin.

<https://bappeda.papua.go.id/>



REDAKSI

Penanggung Jawab
Ir. John Wicklif Tegai, MM

Pimpinan Redaksi
Verra A.P Wanda, ST., M.Si

Sekretaris Redaksi
Robeka P. Mansnandifu, S.Sos., MM

Redaktur Pelaksana
Henry David Maspaitella, S.STP, M.Si
Merlina Hamadi, SE., MM
Najib Suaery, SE., MM

Peliput Berita
Novita Hana Mramra, SE
Mikha Bukorpioper
Elisabeth S. Lumingkewas

Editor
Novi Agaki, S.S
Syaiful Musaad
Donny Renmaur, S.STP

Layout & Desain Buletin
Yanu Misdianto, S.Kom
Indra Rukmana, S.Kom



Pelatihan Penyusunan RAP Otonomi Khusus dan DTI Provinsi Papua

Jayapura, 4 September 2025 – Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan, Yohanes Walilo, S.Sos., M.Si, secara resmi membuka Pelatihan Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan (RAP) Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Provinsi Papua tahun 2025. Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Keuangan RI, Tim Wahana Visi Papua, serta para kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

Dalam sambutannya, Yohanes Walilo menekankan pentingnya pemanfaatan dana

Otsus dan DTI yang efektif untuk mempercepat pembangunan di Papua. Ia berharap, melalui pelatihan ini, para peserta dapat meningkatkan kapasitas dalam menyusun anggaran yang lebih terukur, transparan, dan akuntabel, demi kesejahteraan masyarakat Papua.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan juga mengingatkan bahwa tantangan pembangunan di Papua memerlukan kerja keras dan kolaborasi semua pihak, serta perencanaan program yang strategis dan berorientasi hasil. Ia mendorong peserta pelatihan untuk serius

menyerap ilmu dan pengalaman selama pelatihan berlangsung. Pelatihan ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam memaksimalkan pemanfaatan Dana Otsus dan DTI untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan di Papua.

Selain itu, perlu untuk di ketahui bersama-sama perubahan PMK terbaru yakni PMK No. 33 Tahun 2024 menyatakan bahwa indikator kinerja yang sebelumnya ada 4 sekarang bertambah menjadi 5 indikator kinerja, yakni 1. Penetapan RAP tepat waktu, 2. Penetapan APBD tepat waktu,; (1 dan 2) sebelum bulan

desember, 3. Pencapaian output kegiatan, 4. Pencapaian SILPA, dan 5. Penyampaian dokumen salur. (Tahap I paling lambat bulan April, Tahap II Juni, dan Tahap III November.

Maka dengan adanya capaian kinerja yang harus dicapai maka diperlukannya saling kerjasama dan koordinasi yang baik dan intens antar OPD dan TAPD sehingga kinerja tata kelola Otsus dapat berjalan dengan baik dan berdampak pada peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (khususnya OAP).



Rapat Koordinasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Papua

Jayapura, 11 Juni 2024 – Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Y. Derek Hegemur, SH., MH, secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Provinsi Papua di Jayapura. Acara ini dihadiri oleh Dirjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri RI, Sekretaris Eksekutif TNP2K dari Sekretariat Wakil Presiden RI, serta berbagai pejabat pemerintah daerah Papua. Dalam sambutannya, Pj Sekda Papua Y. Derek Hegemur menekankan pentingnya komitmen bersama untuk mencapai target nasional penghapusan kemiskinan ekstrem hingga 0-1% pada tahun 2024. Pj Sekda Papua menjelaskan bahwa kemiskinan ekstrem di Papua dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk rendahnya tingkat pendidikan dan dominasi

sektor informal dalam sumber penghidupan keluarga miskin.

Melalui Rakor ini, Gubernur berharap dapat meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan stakeholder terkait dalam menyusun strategi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, salah satunya melalui Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Papua 2023-2026. Diharapkan juga, Rakor ini menghasilkan dokumen penting terkait anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan ekstrem di tahun 2024-2025. Pj Sekda Papua menegaskan bahwa penghapusan kemiskinan ekstrem adalah tanggung jawab bersama dan membutuhkan sinergi dari semua pihak. Dengan kolaborasi yang kuat, diharapkan masyarakat Papua dapat segera merasakan

kesejahteraan yang lebih baik. Rapat Koordinasi ini menjadi bagian dari upaya strategis Papua untuk mencapai visi Indonesia tanpa kemiskinan ekstrem di tahun mendatang.

Pemerintah telah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0 - 1 % di Tahun 2024 ini. "Ini Tantangan yang Luar Biasa, Kita tidak bisa kerja sendiri-sendiri, kita harus benar-benar berkomit, kerja berkolaborasi, kerja keroyokan supaya benar-benar kita bisa mencapai harap atau target-target nasional 1 %" Ucap Pj Sekda Papua Derek Hegemur dalam sambutannya mewakili Pj. Gubernur Papua pada Rapat Koordinasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Jayapura, 11 Juli 2024. Angka Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Papua yang masih 28 Kabupaten dan 1 Kota berdasarkan Data Susenas BPS per Maret 2023 berada pada 7,67 atau turun 3,25 poin dari posisi 10,92 di Tahun 2022. Oleh sebab itu, perlu ada upaya yang lebih serius

dari Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Program kegiatan yang tepat program, tepat indikator, tepat lokasi, tepat sasaran intervensi.

Sementara itu Parulian Pardede dalam laporannya menyampaikan tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan wawasan, kapasitas, komitmen dan sinergi Pemerintah Provinsi Papua bersama stakeholder terkait implementasi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid dengan peserta dari SKPD di lingkup Pemprov Papua, BPS Perwakilan Papua, BUMN melalui luring dan Bappeda dari 8 Kabupaten dan 1 kota Se Papua melalui daring, yang menjadi Narasumber dalam kegiatan dari Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah (SUPD) Ditjen Bina Bangda Kemendagri dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wakil Presiden. ***



Rembuk Stunting Provinsi Papua dan Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Stunting Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua tahun 2024

Jayapura, 15 Mei 2024 - Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Y. Derek Hegemur, SH., MH, secara resmi membuka acara Rembuk Stunting Provinsi Papua dan Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Stunting Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua tahun 2024 yang diselenggarakan di sebuah Hotel di kawasan Entrop pada hari Rabu 15 Mei 2024. Acara ini dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Papua, para Bupati dan Walikota se-Provinsi Papua, para kepala SKPD, serta berbagai perwakilan dari instansi terkait ditambah undangan-undangan lainnya seperti dari Forkopimda Provinsi Papua, perwakilan dari Swasta, PKK Provinsi

Papua, Unsur Tokoh Masyarakat dan Mitra Pembangunan.

Dalam sambutannya, Pj Gubernur yang di wakili oleh Pj Sekda Papua menekankan pentingnya kolaborasi dan komitmen semua pihak dalam menangani permasalahan stunting di Papua. Stunting, atau kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis, masih menjadi masalah serius di Papua dengan prevalensi 28,6% menurut Data Survey Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023.

Rembuk Stunting ini merupakan bagian dari Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting tahun 2023 dan bertujuan untuk

menyampaikan capaian dan rencana program kegiatan yang akan dilakukan oleh SKPD terkait. Pj Gubernur berharap acara ini dapat menghasilkan sosialisasi yang efektif mengenai rencana program kegiatan tahun 2024, mendapatkan dukungan komitmen dari seluruh stakeholder terkait, dan melaksanakan evaluasi kinerja konvergensi stunting untuk perbaikan di masa mendatang.

Beliau juga mengingatkan bahwa stunting sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor di luar kesehatan, seperti ketersediaan air bersih dan sanitasi, jaminan sosial, serta pola asuh. Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan secara konvergen dan menyeluruh, sebab berdasarkan hasil penelitian yang ada menunjukkan kontribusi dari Non Kesehatan jauh lebih besar, yaitu berkisar hingga 70% terhadap stunting.

Acara Rembuk Stunting ini diharapkan dapat menjadi wadah diskusi konstruktif dan menghasilkan solusi nyata untuk menanggulangi stunting di Papua, sehingga

dapat mewujudkan generasi Papua yang sehat, cerdas, dan produktif.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pj. Gubernur Papua secara resmi membuka acara Rembuk Stunting dan Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Stunting Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua tahun 2024. Penilaian Konvergensi Stunting Kabupaten/Kota ini merupakan salah satu amanat Pemerintah Pusat selama rembuk stunting. Penilaian konvergensi bertujuan mengevaluasi sekaligus mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten/Kota dalam implementasi 8 Aksi Konvergensi untuk penurunan Prevalensi Stunting di Kabupaten/Kota. "Permasalahan stunting adalah tanggung jawab bersama. Mari kita susun program kerja yang konkret dan sinergis untuk menanggulangi stunting di Papua," tutupnya. Acara ini dihadiri oleh 9 Kab/Kota Se-Provinsi Papua dan OPD Provinsi Papua serta Mitra Pembangunan dan BKKBN Perwakilan Provinsi Papua.



Papua Gelar Peningkatan Kapasitas Pembangunan Berkelanjutan

Jayapura, 21-22 Mei 2024 – Pemerintah Provinsi Papua, bekerja sama dengan KEMITRAAN melalui Program BERKILAU, menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pembangunan Berkelanjutan ASN dan masyarakat sipil dalam Implementasi Pembangunan Rendah Karbon, dengan peserta dari SKPD dalam lingkungan Provinsi Papua yang terkait, beberapa perwakilan dari kelompok masyarakat sipil, dan perwakilan akademisi.

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari kegiatan Lokakarya Penandaan Anggaran Iklim (Workshop Climate Budget Tagging

(CBT)) yang diselenggarakan pada tanggal 17 November 2023 yang lalu. Pada hari pertama, tanggal 21 Mei 2024, diselenggarakan Diseminasi Hasil analisis penandaan anggaran iklim pada beberapa SKPD yang terkait, yang dilakukan secara talkshow dengan narasumber dari Bappenas (Direktur Lingkungan Hidup), Bapperida (Plh. Kasubbid SDA dan Pengairan), KEMITRAAN (Direktur Lingkungan dan Tata Kelola Berkelanjutan) dan Perwakilan CSO Papua, serta diskusi mengenai pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pembangunan Rendah Karbon di daerah, dan bagaimana alternatif pendanaan lingkungan

dan perubahan iklim.

Pada hari kedua, tanggal 22 Mei 2024, diselenggarakan Pelatihan AKSARA (yaitu platform pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan rendah karbon di Daerah) yang diikuti oleh SKPD terkait.

Melalui workshop ini, diharapkan dengan meningkatnya pemahaman dan pengetahuan mengenai pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim, peserta baik pemerintah daerah maupun akademisi dan masyarakat sipil dapat secara teknis, terukur dan berkelanjutan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing ataupun peran masing-masing

lembaga sebagaimana visinya masing-masing, mengimplementasikan aksi mitigasi dan adaptasi sebagai upaya penanganan isu perubahan iklim. Hal ini juga untuk menyiapkan daerah dalam upaya mencapai ketahanan air, pangan dan energi. Ide-ide alternatif pembiayaan diharapkan dapat dikembangkan, baik melalui alternatif sumber-sumber pendanaan yang sudah ada maupun juga dapat berasal dari aksi mitigasi dan adaptasi itu sendiri, yang dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, maupun melalui kelompok-kelompok masyarakat, lembaga pendidikan dan sektor swasta.





Rapat Koordinasi Informasi Geospasial (IG) Regional Papua-Maluku

Jayapura, 21 Mei 2024 - Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan, Yohanes Walilo, S.Sos., M.Si secara resmi membuka Rapat Koordinasi Informasi Geospasial (IG) Regional Papua-Maluku yang berlangsung di Jayapura dengan Tema "Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Indonesia Emas dengan Informasi Geospasial yang Holistik, Integratif, dan Berkelanjutan". Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada perwakilan Badan Informasi Geospasial (BIG) dan pemerintah daerah di wilayah Papua dan Maluku.

Rapat ini merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045, dengan memanfaatkan data dan informasi geospasial sebagai salah satu pilar utama dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam. Gubernur Rumaskun menekankan bahwa informasi geospasial berperan krusial dalam pengambilan keputusan strategis, terutama dalam konteks pembangunan

daerah yang efisien dan berkelanjutan.

Namun, beliau juga menggarisbawahi tantangan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan informasi geospasial di daerah, seperti keterbatasan data berskala besar dan kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten di bidang ini. Oleh karena itu, Rapat Koordinasi ini diharapkan menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi antar instansi serta meningkatkan kapasitas SDM di wilayah Papua dan Maluku dalam mengelola informasi geospasial.

Pada akhir sambutannya, Yohanes Walilo mengajak seluruh peserta rapat untuk menjalin sinergi yang kuat demi tercapainya tujuan bersama, yaitu mewujudkan visi Indonesia Emas melalui pemanfaatan informasi geospasial yang lebih baik dan holistik.

Rapat Koordinasi ini juga menjadi bagian dari persiapan Rencana Induk Penyelenggaraan Informasi Geospasial yang akan ditetapkan pada tahun 2024.

Papua Susun Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2025-2029

Jayapura, 23 Oktober 2024 – Pemerintah Provinsi Papua merilis dokumen Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RAK LLAJ) untuk periode 2025-2029. Dokumen ini disusun untuk menanggapi tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang masih menjadi perhatian serius, baik di tingkat nasional maupun provinsi. Berdasarkan laporan dari Kepolisian Daerah Papua, tren kecelakaan lalu lintas di Papua cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir, dengan total 8.148 kasus dari 2019 hingga 2023 yang menyebabkan kerugian materi sebesar Rp 64 miliar. RAK LLAJ 2025-2029 berfokus pada lima pilar keselamatan yang melibatkan

beberapa instansi pemerintah, termasuk Dinas Perhubungan, Bapperida, PUPR, dan Kepolisian Daerah Papua. Pilar-pilar ini meliputi kebijakan keselamatan jalan, pengembangan infrastruktur yang aman, hingga peningkatan edukasi dan pengendalian perilaku pengguna jalan. Gubernur Papua menyampaikan harapannya agar RAK LLAJ ini dapat diintegrasikan dalam perencanaan daerah, sehingga implementasinya mendapat dukungan penuh dari pemerintah kabupaten/kota serta alokasi anggaran yang memadai. Langkah ini diharapkan mampu menurunkan rasio fatalitas kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan keselamatan di jalan bagi seluruh masyarakat Papua.



Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 Dan Musrenbang Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun 2025

Jayapura, 24 April 2024 - Penjabat Gubernur Papua, Dr. M. Ridwan Rumasukun, SE., MM, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Papua tahun 2024. Acara Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025, dan Musrenbang Otsus Provinsi Papua Tahun 2025, Bertujuan untuk menyepakati arah dan kebijakan pokok pembangunan jangka panjang dan jangka waktu 1 (satu) tahun serta membahas dan menyepakati program kegiatan, target kinerja, lokasi, dan sasaran prioritas pembangunan daerah yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus.

Dalam sambutannya Gubernur Ridwan Rumasukun mengajak seluruh peserta untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Musrenbang ini dapat terlaksana. Gubernur menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, serta para undangan lainnya yang hadir dan berpartisipasi dalam acara ini.

Musrenbang tahun 2024 ini mengusung tema "Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkarakter Berbasis Ekonomi Inklusif sebagai Modal Dasar Transformasi Pembangunan Papua." Prioritas pembangunan yang ditetapkan meliputi

peningkatan kualitas dan pemerataan sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah, peningkatan keamanan dan ketertiban berbasis keberagaman dan keagamaan, serta peningkatan tata kelola pemerintahan.

Gubernur Ridwan Rumasukun berharap forum Musrenbang ini dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai ruang diskusi konstruktif untuk melahirkan berbagai gagasan yang baik dalam menjawab isu-isu pembangunan di Papua. Beliau juga menekankan pentingnya keselarasan antara program dan kegiatan pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pj. Gubernur Papua secara

resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, dan Musrenbang Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun 2025.

"Marilah kita selalu optimis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkeadilan, serta mempersiapkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia Papua sebagai modal dasar untuk maju dan berdaya saing dalam melanjutkan pembangunan ke depan," pungkasnya.

Acara ini dihadiri oleh berbagai pejabat pemerintah, kepala dinas, serta perwakilan dari media cetak dan elektronik.





Rapat Koordinasi Manajemen Daerah (Rakormanda) Provinsi Papua

Jayapura, 24 September 2024 – Asisten Bidang Umum, Y. Derek Hegemur, SH., MH, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Manajemen Daerah (Rakormanda) Provinsi Papua yang merupakan bagian dari Program Kerjasama Pemerintah RI dengan UNICEF untuk periode 2021-2025. Acara ini dihadiri oleh Direktur SUPD IV Dirjen Bangda Kemendagri, Kepala UNICEF Indonesia, serta berbagai kepala dinas dari Provinsi dan kabupaten/kota di Papua.

Dalam sambutannya, Asisten Bidang Umum, Y. Derek Hegemur, SH., MH menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan UNICEF dalam mencapai berbagai target pembangunan di Papua, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, gizi, air dan sanitasi, serta perlindungan anak. Beliau juga menyoroti bahwa angka stunting dan kekerasan terhadap anak di Papua masih tinggi, serta ada sejumlah kabupaten dan kota yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem.

Rakormanda ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi, fasilitasi, perencanaan, serta monitoring dan evaluasi program kerjasama antara Pemerintah RI dan UNICEF. Y. Derek Hegemur berharap kegiatan ini dapat menghasilkan evaluasi dan rekomendasi penting untuk pelaksanaan program di tahun-tahun mendatang, sehingga dapat mendukung pencapaian target SDGs Anak di berbagai bidang.

Para peserta, baik yang hadir secara daring maupun luring, diharapkan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan serius. Y. Derek Hegemur menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada komitmen dan kerja sama semua pihak yang terlibat. Dengan dibukanya Rakormanda ini, diharapkan akan ada peningkatan signifikan dalam pelaksanaan program-program yang dapat membawa manfaat besar bagi masyarakat Papua, terutama anak-anak.

Rapat Koordinasi Teknis Daerah (Rakortekda) Papua 2024 Berfokus pada Program Kerjasama RI-UNICEF

Jayapura, Februari 2024 – Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anak dan masyarakat di Papua, Pemerintah Provinsi Papua bekerja sama dengan UNICEF mengadakan Rapat Koordinasi Teknis Daerah (Rakortekda) untuk tahun 2024. Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk pejabat kementerian, perwakilan UNICEF, dan kepala dinas dari sejumlah kabupaten di Papua. Rakortekda ini menjadi bagian penting dari program kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan UNICEF untuk periode 2021-2025, dengan fokus pada peningkatan layanan nutrisi, kesehatan, wash, pendidikan, perlindungan anak, kebijakan sosial, serta kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Gubernur Papua, dalam sambutannya, menekankan komitmen pemerintah daerah untuk mencapai target yang telah ditetapkan, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan usia dini, dan pengurangan angka stunting. Selain itu, pertemuan ini menjadi ajang untuk menyepakati solusi atas berbagai permasalahan pelaksanaan program di wilayah Papua, dengan tujuan mencapai target SDGs untuk anak-anak serta peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua. Rakortekda Papua 2024 diharapkan menghasilkan rekomendasi penting untuk kelanjutan program di tingkat pusat, demi menciptakan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Papua.





Papua Gelar Coaching Clinic 1 Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dan Implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) Provinsi Papua Tahun Anggaran 2024

Jayapura, 19 Mei 2024 – Plt. Kepala Bapperida Provinsi Papua resmi membuka Coaching Clinic pertama untuk Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 2024 di Jayapura. Acara ini bertujuan mempercepat pembangunan sanitasi berkelanjutan di wilayah Papua melalui Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). Coaching Clinic ini dihadiri oleh berbagai Pejabat Kementerian dan Pimpinan Daerah, serta perwakilan dari Pokja Sanitasi Permukiman.

Program PPSP yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat menargetkan 90% akses sanitasi layak (termasuk 15% akses aman

di dalamnya) dan 100% akses sampah perkotaan pada tahun 2024, selaras dengan RPJMN 2020-2024. Dalam sambutannya, Plt. Kepala Bapperida Papua menekankan pentingnya komitmen kepala daerah dalam menerapkan strategi ini secara efektif, mulai dari peningkatan kapasitas pengelolaan sanitasi hingga pendanaan alternatif.

Melalui kegiatan ini, diharapkan tercapai kesepahaman dan komitmen seluruh pihak untuk melaksanakan kebijakan sanitasi berkelanjutan di Papua, serta memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk mencapai target pembangunan sanitasi di wilayah tersebut.

Pj Gubernur Papua Dorong Efektivitas Pelaksanaan APBD 2024 Melalui Monitoring Meja

Jayapura, 30 Juli 2024 – Dalam rangka memastikan kelancaran pelaksanaan program pembangunan, Gubernur Papua mengadakan Monitoring Meja Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Kegiatan ini bertujuan menilai pencapaian program dan sub kegiatan dari setiap SKPD serta memastikan anggaran digunakan secara efisien dan efektif. Dalam arahannya, Gubernur menyoroti daya serap anggaran yang masih di bawah 50%, menekankan pentingnya percepatan pengadaan barang dan jasa sesuai regulasi, dengan prioritas produk dalam negeri. Gubernur juga meminta seluruh SKPD untuk melaporkan capaian fisik secara berkala melalui aplikasi TP2K Rev, meski aplikasi ini belum terintegrasi penuh dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) RI. Kegiatan Monitoring Meja ini akan dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Tim Pengendali Program dan Kegiatan (Rakor TP2K) untuk mengevaluasi progres penyerapan dana dan

target fisik dari program prioritas, termasuk penanganan kemiskinan, inflasi, dan stunting.

Kegiatan yang dihadiri oleh 41 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini bertujuan mengukur capaian realisasi fisik dan keuangan program serta mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya. Plt. Kepala Bapperida Provinsi Papua, Ir. Jhon Wicklif Tegai, MM dalam laporannya menyampaikan bahwa per 26 Juli 2024, realisasi fisik APBD baru mencapai 26,72% dengan realisasi keuangan 26,73%. Angka ini masih tergolong rendah, mengingat waktu pelaksanaan APBD efektif tersisa lima bulan. Ia mengimbau SKPD untuk mempercepat proses pengadaan dan melaporkan kendala yang dihadapi kepada tim pembahas agar dapat segera ditindaklanjuti. Rapat Monitoring Meja ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, terutama dalam pencapaian target pembangunan di Papua.



Lomba Inovasi Daerah "LOVE PAPUA"

Jayapura, 09 Oktober 2024 - Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah, tujuan inovasi daerah adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang sasarannya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.

Untuk mencapai tujuan sasaran tersebut melalui upaya penciptaan inovasi-inovasi di daerah yang antara lain terbagi menjadi 3 bentuk inovasi yaitu, Inovasi tata kelola pemerintahan, Inovasi pelayanan publik, Inovasi daerah lainnya yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah diinisiasi oleh perangkat daerah.

Penilaian inovasi daerah dilaksanakan untuk menjaring dan menyeleksi inovasi daerah untuk diberikan penghargaan. Kompetisi inovasi dilaksanakan melalui kegiatan

penjaringan, seleksi, penilaian dan pemberian penghargaan kepada inovator.

Lomba inovasi ini bertujuan, Memberikan apresiasi dan penghargaan bagi para inovator dalam upaya mendorong pengembangan dan pemanfaatan inovasi di Provinsi Papua, Memacu dan memotivasi OPD pada Pemerintah Provinsi Papua untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas sesuai dengan bentuk inovasi, Menjaring ide inovasi peningkatan pendapatan asli daerah, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik yang berpotensi untuk diuji coba dan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Menjaring Inovasi yang akan diikutsertakan dalam laporan Inovasi Daerah yang dilaksanakan oleh kementerian ataupun lembaga Pemerintah Pusat.

Lomba inovasi bertema "Pemulihan Sosial Ekonomi dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah",

Pemulihan sosial ekonomi merujuk pada upaya untuk memulihkan atau memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak oleh krisis, bencana, atau gangguan lainnya. Pemulihan ini melibatkan berbagai aspek, termasuk

Ekonomi: Menghidupkan kembali aktivitas ekonomi yang melambat atau terhenti, seperti meningkatkan lapangan kerja, memperkuat industri, mendukung usaha kecil dan menengah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sosial: Memastikan kesejahteraan masyarakat dengan memulihkan akses ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Ini juga termasuk pemulihan stabilitas sosial, mengurangi ketidaksetaraan, dan mengatasi kemiskinan.

Pemulihan sosial ekonomi biasanya dilakukan melalui kebijakan pemerintah, bantuan internasional, serta partisipasi masyarakat dan sektor swasta. Tujuannya adalah untuk menciptakan kondisi yang stabil, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat agar dapat bangkit dari krisis dan bergerak menuju kesejahteraan bersama.



Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting karena memberikan kemandirian finansial bagi daerah, memungkinkan mereka untuk mengelola dan mengembangkan wilayah tanpa terlalu bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Dengan PAD yang cukup, daerah dapat meningkatkan kualitas layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan, serta memperbaiki infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, PAD yang lebih tinggi mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor-sektor lokal seperti pariwisata, yang dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing daerah. Peningkatan PAD juga mengurangi ketergantungan pada subsidi pusat, memberikan daerah ketahanan terhadap fluktuasi ekonomi dan krisis, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

Kriteria Inovasi, memiliki kebaruan yakni memperkenalkan gagasan yang unik dan pendekatan yang baru dalam penyelesaian masalah, atau kebijakan dan desain pelaksanaan yang unik atau modifikasi dari pelayanan publik yang telah ada, efektif & bermanfaat, yakni memperlihatkan hasil yang nyata dan memberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan, serta menyelesaikan permasalahan yang menjadi kepentingan dan perhatian publik, merupakan Urusan dan kewenangan daerah serta dapat di replikasi dan aplikatif.

Kategori Lomba, Kategori I Inovasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah; Merupakan Inovasi

dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dilakukan melalui digitalisasi sistem pajak dan retribusi, pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pemungutan, serta optimalisasi pengelolaan aset daerah dan pengembangan sektor unggulan untuk memaksimalkan potensi ekonomi lokal, Kategori II Inovasi Tata Kelola Pemerintahan; merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen, Kategori III Inovasi Pelayanan Publik; merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik, Kategori IV Uji Coba Inovasi Daerah; Inovasi sedang disusun oleh ASN atau OPD namun belum diterapkan pada periode 2022-2024 yang direncanakan akan di terapkan pada tahun depan.

Jenis Inovasi, Jenis Inovasi terbagi menjadi 2 (Dua) Yaitu Inovasi Digital, Inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan platform dunia maya atau menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai alat bagi perluasan jangkauan layanan pemerintahan kepada khalayak secara lebih luas, Inovasi Non Digital, Inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan alat bantu manual yang disertai dengan Standard Operational Procedure (SOP) dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan.

Pilot Project Pembangunan Kampung Mandiri Ekonomi (KAMI Papua): Pola Pembangunan Kolaboratif Pemerintah Provinsi Papua

Peluncuran Pilot Project Pembangunan Kampung Mandiri Ekonomi dilaksanakan pada Jumat (13/09) di Kampung Bring Distrik Kemtuk Gresi Kabupaten Jayapura. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Bapperida Provinsi Papua melalui Bidang Perekonomian yang dirangkai dalam Kunjungan Kerja Gubernur di Kabupaten Jayapura, khususnya di Distrik Kemtuk Gresi. Kegiatan yang diresmikan langsung oleh Pj Gubernur Papua, Mayjen TNI (Purn) Ramses Limbong, S.IP., M.Si, ini dihadiri oleh para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Papua dan jajarannya, Pj Bupati Kabupaten Jayapura dan jajarannya, perwakilan dari BUMN dan BUMD, serta masyarakat Kampung Bring.

Dalam kesempatan tersebut, Pj Gubernur Papua menyampaikan bahwa "Dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan maka diperlukan langkah-langkah perluasan atau pemerataan yang dapat mengurangi kesenjangan melalui beberapa kebijakan yang berpihak pada Masyarakat kecil atau masyarakat di kampung yang wilayahnya sulit akses". Lebih jauh, Limbong, juga menjelaskan bahwa hal yang perlu dilakukan adalah menyusun konsep pengembangan dan pemberdayaan kampung yang dibangun dengan melibatkan seluruh sektor, terutama sektor rumpun ekonomi yang secara bersama-sama dan terintegrasi diarahkan untuk membangun keterampilan masyarakat petani, memperkuat kelembagaan ekonomi kampung, pemasaran hasil produk, peningkatan nilai tambah produk untuk menggerakkan perekonomian kampung berbasis potensi lokal dengan memperhatikan aspek-

aspek pembangunan berkelanjutan, dan mengurangi ketergantungan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam kesempatan wawancara dengan Kabid Perekonomian Bapperida Provinsi Papua, Dr. Bintang Yuliana, SE., MM, menjelaskan bahwa konsep pengembangan dan pemberdayaan kampung perlu segera disusun karena sudah merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah untuk mengangkat kondisi kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya Orang Asli Papua (OAP), menuju pada kehidupan yang lebih sejahtera. Dengan melihat peluang keunggulan komparatif yang dimiliki Provinsi Papua berupa tanah yang subur dan keanekaragaman hayati yang bernilai tinggi, serta kurang lebih 70 persen masyarakatnya bekerja di

sektor pertanian, maka gagasan untuk mewujudkan program pembangunan kampung mandiri ekonomi merupakan bentuk sebuah kesadaran untuk mensejahterakan masyarakat yang dimulai dari level kampung.

Yuliana juga menjelaskan bahwa, program pembangunan kampung mandiri ekonomi di Provinsi Papua saat ini diawali dengan kegiatan yang bersifat pilot project. Ada beberapa parameter yang digunakan dalam survei untuk menentukan lokasi fokus (lokus), antara lain komoditi yang sudah survive di pasar, Pemerintahan Kampungnya yang berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait desa, pengelolaan kampung dan lingkungan yang berkelanjutan, kelompok tani di kampung yang sudah terbentuk, serta pemahaman



masyarakat di kampung terkait kelembagaan usaha kampung yang sudah terbangun. Setelah dilakukan survei di beberapa kampung berdasarkan parameter tersebut, maka ditentukanlah Kampung Bring Distrik Kemtuk Gresi Kabupaten Jayapura sebagai kampung pertama yang menjadi lokus untuk Pilot Project Pembangunan Kampung Mandiri Ekonomi Provinsi Papua. Selanjutnya, guna mendukung penyiapan pondasi program pembangunan kampung mandiri ekonomi Provinsi Papua, maka pengawalan program dilakukan dengan cara menjalankan cakram ekonomi (panduan strategi pelaksanaan) sehingga dapat mempermudah dalam perumusan program/kegiatan hulu – hilir secara berjenjang. Program/kegiatan hulu – hilir tersebut akan dijalankan oleh OPD teknis berbasis kewenangan.

Adapun tujuan dari Pilot Project Pembangunan Kampung Mandiri Ekonomi Provinsi Papua antara lain sebagai pembelajaran kepada masyarakat, mulai dari pengelolaan komoditi sampai pada pemasaran serta kelembagaan usahanya.

Selain itu juga, bagi Pemerintah, pada akhirnya dapat memberikan contoh terkait pola pembangunan kolaboratif pertama kalinya di Provinsi Papua karena program ini berjalan secara lintas sektor, lintas kewenangan, dan lintas sumber pembiayaan yang berasal dari APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBD Kampung. Lebih jauh, program kolaboratif ini sebenarnya telah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun, walaupun secara resmi peluncurannya baru dilakukan pada Jumat (13/09). Dalam pelaksanaannya, telah banyak aktifitas dilakukan secara kolaborasi yang melibatkan OPD Provinsi Papua, OPD Kabupaten Jayapura, dan Pemerintah Kampung Bring, yang pada akhirnya diharapkan dapat berkontribusi dalam proses akselerasi pembangunan menuju Provinsi Papua yang mandiri secara ekonomi, sosial, dan budaya di masa mendatang. Selain itu juga, program ini diharapkan dapat menghasilkan pola kerja Pemerintah yang sudah mulai terbentuk, yang disebut pola pembangunan kolaboratif.

Saat ini di Kampung Bring, Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Tanaman



Pangan, Hortikultura dan Pangan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, serta Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup telah melakukan pengadaan bibit tanaman; Dinas Kelautan dan Perikanan telah melakukan pengadaan bibit ikan air tawar; Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan pengadaan rumah sungkup untuk penjemuran biji kakao; serta Dinas Kominfo telah mengadakan internet kampung. Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah mengadakan rumah penampungan hasil kakao; Dinas PUPR telah menyediakan jalan sepanjang 2,8 Km; serta DPMK melakukan pendampingan dari sisi kampung. Pemerintah Kampung Bring pun telah melakukan penataan lingkungan kampung. Selain itu, PT. Freeport Indonesia telah melakukan penanaman pohon untuk penghijauan. Direncanakan, Bank Indonesia akan menyediakan air bersih.

Untuk menjaga keberlangsungan program ini, maka tindak lanjut untuk jangka pendek telah termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026. Besar harapan agar program ini dapat dilanjutkan oleh Kepala Daerah terpilih dan termuat dalam dokumen

perencanaan pembangunan Provinsi Papua selanjutnya. Terkait pengelolaan anggaran, rencana tindak lanjutnya diarahkan pada pematangan dengan fokus selama 2 (dua) tahun pertama di sektor hulu, yaitu diperbanyak kegiatan dalam bentuk penyediaan bibit tanaman untuk meningkatkan produksi. Tanaman kakao sebagai pengembangan usaha dan tanaman horti sebagai komoditi pendukung untuk pengentasan kemiskinan.

Pilot Project Pembangunan Kampung Mandiri Ekonomi Provinsi Papua yang saat ini telah berjalan di Kampung Bring Distrik Kemtuk Gresi Kabupaten Jayapura untuk sektor pertanian dan baru dimulai tahun 2024 untuk sektor perikanan di Kampung Soryar Distrik Biak Timur Kabupaten Biak Numfor, diharapkan dapat berdampak positif, khususnya untuk kelembagaan kelompok tani yang diarahkan dapat eksis, kelembagaan usaha level kampung dapat berkembang dan menciptakan usaha-usaha turunan, serta dapat memaksimalkan komoditi unggulan. Selain itu, diharapkan juga akan menginspirasi dilaksanakannya pembangunan kampung mandiri ekonomi lainnya di beberapa Kabupaten/Kota.





Pendataan OAP untuk Perencanaan Pembangunan Papua yang Lebih Baik

Jayapura, September 2024 – Pemerintah Papua melalui Sistem Informasi Orang Papua (SIO Papua) memperkuat upaya pendataan penduduk terpilah antara Orang Asli Papua (OAP) dan Non-OAP sebagai langkah strategis dalam mendukung perencanaan pembangunan berbasis data.

Definisi OAP sendiri mengacu pada UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, yang mencakup orang dari rumpun Melanesia atau mereka yang diakui sebagai bagian dari masyarakat adat Papua. Data valid mengenai jumlah dan kondisi OAP menjadi dasar untuk pengalokasian Dana Otonomi Khusus (Otsus)

serta perencanaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Menurut Pelaksana Seksi Analisa data dan Informasi, Bapperida Papua, Merlin Hamadi menjelaskan implementasi SIO Papua melibatkan pengumpulan data di tingkat kampung yang dilakukan oleh kader lokal. Sistem ini tidak hanya mencatat data kependudukan, tetapi juga informasi sosial dan ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk merancang dan melaksanakan program kegiatan yang lebih tepat sasaran.

SIO Papua dirancang selaras dengan kebijakan nasional, seperti Perpres No. 39 Tahun 2019

tentang Satu Data Indonesia. Forum Satu Data Papua, yang disebut Papua Integrasi Satu Data (PAITUA), akan menjadi wadah untuk memastikan data terintegrasi, mutakhir, dan valid di seluruh wilayah Papua.

Namun, pemerintah menghadapi tantangan berupa kesenjangan data sektoral yang belum terintegrasi. Oleh karena itu, sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi kunci sukses pelembagaan SIO Papua.

"Melalui kolaborasi dengan masyarakat sipil dan penguatan tim pelatih serta kader kam-

pung, kami berharap data OAP

yang dihasilkan tidak hanya membantu alokasi Dana Otsus, tetapi juga menjadi fondasi pembangunan Papua yang inklusif dan berkelanjutan," ujar perwakilan Program SKALA, mitra pemerintah dalam implementasi SIO Papua.

Pendataan yang terintegrasi ini menjadi langkah penting untuk mengatasi berbagai kesenjangan dan memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat Papua, khususnya Orang Asli Papua.

● Serba-serbi..



Papua Susun Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2025-2029.



Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 Dan Musrenbang Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun 2025.



Rapat Koordinasi Manajemen Daerah (Rakormanda) Provinsi Papua.



Pj Gubernur Papua Dorong Efektivitas Pelaksanaan APBD 2024 Melalui Monitoring Meja.



● Serba-serbi..



Papua Gelar Coaching Clinic 1 Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dan Implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) Provinsi Papua Tahun Anggaran 2024.



Rapat Koordinasi Teknis Daerah (Rakortekda) Papua 2024 Berfokus pada Program Kerjasama RI-UNICEF.



Papua Gelar Peningkatan Kapasitas Pembangunan Berkelanjutan.



Rapat Koordinasi Informasi Geospasial (IG) Regional Papua-Maluku.



● Serba-serbi..



Pelatihan Penyusunan RAP Otonomi Khusus dan DTI Provinsi Papua.



Lomba Inovasi Daerah "LOVE PAPUA".



Rapat Koordinasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Papua.



Rembuk Stunting Provinsi Papua dan Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Stunting Kabupaten/Kota se-Propinsi Papua tahun 2024.



● Serba-serbi..



Pilot Project Pembangunan Kampung Mandiri Ekonomi (KAMI PAPUA): pola pembangunan kolaboratif Pemerintah Provinsi Papua.



Kunjungan kasih Bapperida di Panti bina usia lanjut Tresna Werda yang terletak di Pos VII Kampung Sereh Kota Sentani Kabupaten Jayapura.



● Infografis Capaian Kinerja Pembangunan

MISI 1 MEMANTAPKAN KUALITAS DAN DAYA SAING SDM

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

2020	2021
60,44	60,62
2022	2023
61,39	62,25



SUMBER: BPS

HARAPAN LAMA SEKOLAH (HLS)

2020	2021
11,08 Tahun	11,11 Tahun
2022	2023
11,14 Tahun	11,15 Tahun



SUMBER: BPS

ANGKA MELEK HURUF (PENDUDUK YANG BERUSIA >15 TAHUN)

2020	2021	2022
77,90%	78,89%	81,19%
2023		
84,22%		

RATA-RATA LAMA SEKOLAH (RLS)

2020	2021
6,69 Tahun	6,76 Tahun
2022	2023
7,02 Tahun	7,15 Tahun



● Infografis Capaian Kinerja Pembangunan

MISI 2 MEMANTAPKAN RASA AMAN, TENTRAM, DAN DAMAI SERTA KEHIDUPAN DEMOKRASI MEMPERKUAT BINGKAI NKRI

INDEKS

2020	2021	2022
64,54	66,39	66,65
2023		
67,64		



SUMBER : BPS

ANGKA KRIMINALITAS PER 100.000 PENDUDUK

2020	2021	2022
208	186	203



SUMBER : BPS

KRIMINALITAS YANG DISELESAIKAN

2020	2021	2022
52,56%	53,65%	43,37%



2023
SUMBER : BPS

MISI 3 PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

KONTRIBUSI PAD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH

2020	2021
8,11%	15,41%



SUMBER: BPKAD DI OLAH

PREDIKAT AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2020	2021
B	B
2022	2023
B	B



SUMBER: Kemen PAN dan RB

OPINI BPK TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)

2020	2021
WTP	WTP
2022	2023
WDP	WTP

SUMBER: BPKAD



● Infografis Capaian Kinerja Pembangunan

MISI 4

PENGUATAN DAN PERCEPATAN PEREKONOMIAN DAERAH SESUAI POTENSI UNGGULAN LOKAL DAN PEMBANGUNAN WILAYAH BERBASIS KULTURAL

LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI



DENGAN TAMBANG

2020 2,32% 2021 15,11% 2022 8,97%

2023 10,79% SUMBER : BPS

TANPA TAMBANG

2020 -3,51% 2021 2,49% 2022 4,14%

2023 4,42% SUMBER : BPS

DENGAN TAMBANG

2020 57,90 2021 54,03 2022 59,41%

TANPA TAMBANG

2020 41,53 2021 34,13 2022 36,48%



PDRB PERKAPITA (Juta Rupiah)

SUMBER : BPS

SUMBER : BPS

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

2020 4,28% 2021 3,33%
2022 3,60% 2023 3,49%

*) kondisi febuari

SUMBER : BPS

TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA

2020 72,16% 2021 78,29%
2022 80,23% 2023 76,79%



*) kondisi febuari

GINI RATIO (Maret)

2020 0,39 2021 0,40
2022 0,41 2023 0,39



SUMBER : BPS



2020 26,64% 2021 26,86%
2022 26,56% 2023 26,03%

TINGKAT KEMISKINAN

SUMBER : BPS

SUMBER : BPS

TINGKAT INFLASI

2020 0,75% 2021 1,70% 2022 5,81% 2023 1,65%



● Infografis Capaian Kinerja Pembangunan

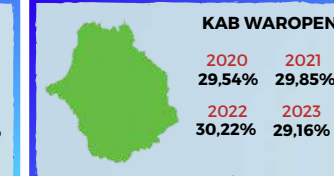
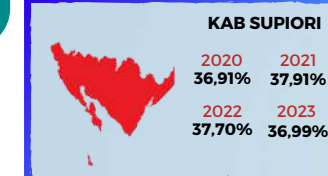
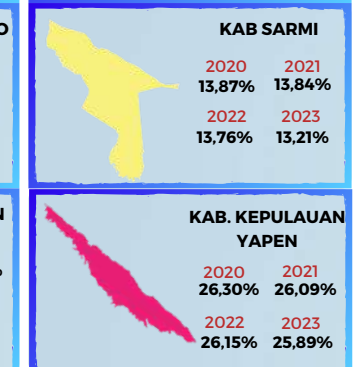
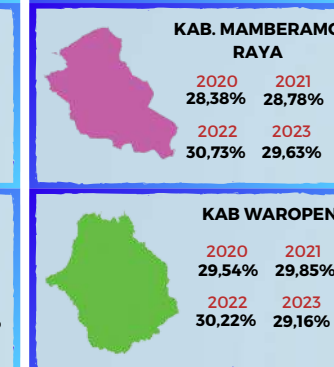
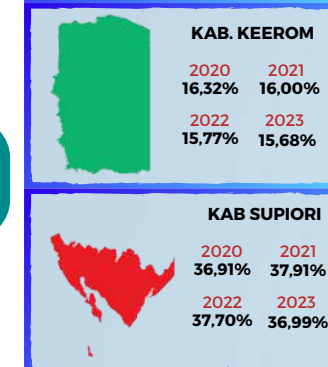
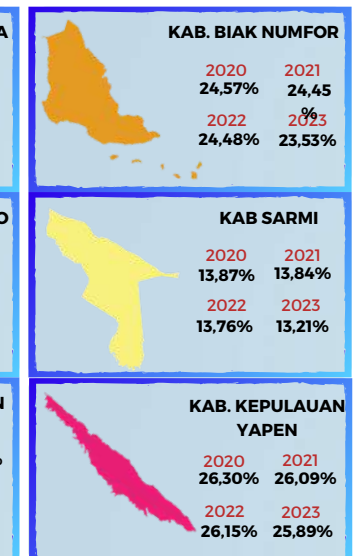
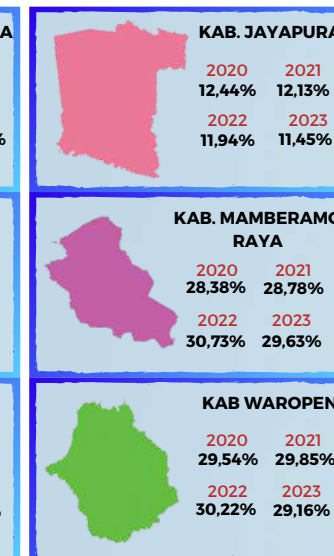
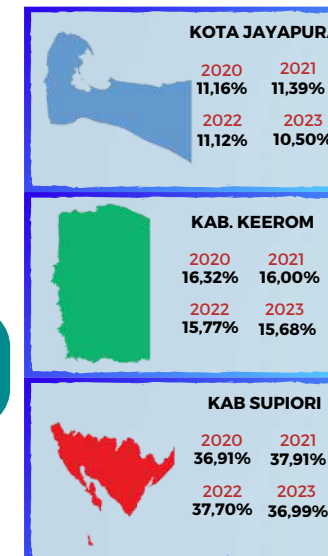
MISI 5

PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAS DAN TERTENTU



TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA

SUMBER : BPS



INDEKS PEMBERDAYAAN

2020 66,72 2021 67,50 2022 68,66 2023 65,70

SUMBER : BPS



INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI

2020 208,90 2021 207,11 2022 192,57 2023 135,56

SUMBER : BPS



**PEMERINTAH
PROVINSI PAPUA**



**PUSDALISBANG
BAPPERIDA PROVINSI PAPUA**
Sie. Pelayanan Informasi dan Komunikasi